



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Landasan Teoritis

1. Relevansi Nilai Informasi Akuntansi

Pengertian

Dalam kerangka konseptual pelaporan keuangan disebutkan bahwa agar suatu informasi keuangan dapat bermanfaat, informasi tersebut harus memenuhi syarat karakteristik kualitatif fundamental yaitu relevan (*relevance*) dan representasi tepat (*faithful representation*). Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas fundamental yang membuat informasi keuangan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang relevan adalah informasi yang mampu membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan jika memiliki nilai prediksi nilai prediksi (*predictive value*), nilai konfirmasi (*confirmatory value*), atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika memiliki nilai sebagai masukan untuk proses prediksi hasil untuk masa yang akan datang, dan memiliki nilai konfirmasi jika mampu membantu pengguna mengkonfirmasi atau mengoreksi tentang ekspektasi sebelumnya (Kieso *et al.*, 2018).

Definisi relevansi nilai yang dikutip dalam beberapa literatur sebagai berikut:

a) Francis and Schipper (1999:236) mendefinisikan relevansi nilai:

“The ability of accounting numbers to summarize the information underlying the stock prices, thus value relevance is indicated by a statistical association between financial information and prices or returns.”

b) Holthausen and Watts (2001:4) mendefinisikan relevansi nilai *“Empirical relation between stock market values (or it changes) and a particular accounting numbers”*.

c) Hellstrom (2007:325) mendefinisikan relevansi nilai:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



“As the ability of financial statement information to capture or summarise information that affects share values and empirically tested as a statistical association between market values and accounting values.”



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- d) Beisland (2009:9) mendefinisikan relevansi nilai: *“The ability of financial statement information to capture and summarise information that determines the firm’s value.”*
- e) Suadiye (2012:302) mendefinisikan relevansi nilai:
“Value relevance is defined as the ability of financial statement information to capture and summarize firm value. Value relevance is measured as the statistical association between financial statement information and stock market values or returns.”
- f) (Subramanyam (2014:76) mendefinisikan relevansi nilai:
“The capacity of information to affect a decision and is the first of two primary qualities of accounting information. This implies that timeliness is a desirable characteristic of accounting information. Interim (quarterly) financial reports are largely motivated by timeliness.”

Dari beberapa definisi diatas dapat diintisarikan bahwa relevansi nilai adalah kemampuan informasi akuntansi yang berkaitan dengan nilai perusahaan (nilai saham) yang diukur sebagai hubungan statistik antara nilai pasar dan nilai akuntansi. Penelitian mengenai relevansi nilai oleh Ball dan Brown pada tahun 1968 merupakan penelitian yang menjadi titik awal yang mendorong para peneliti lain untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara informasi akuntansi (pendapatan, arus kas, dan nilai buku ekuitas) dan nilai pasar (harga saham dan *return*). Relevansi nilai bermanfaat untuk menganalisis hubungan empiris antara nilai pasar saham (*stock market values*) dengan informasi akuntansi untuk menilai pengaruh angka-angka akuntansi di dalam penilaian fundamental perusahaan. Pengukuran secara statistik pada informasi keuangan digunakan untuk mengetahui apakah investor memakai informasi akuntansi tersebut dalam membuat suatu keputusan (Ball and Brown, 1968).

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Informasi keuangan memiliki nilai yang relevan jika terdapat hubungan yang signifikan dengan harga saham dan mencerminkan informasi yang relevan bagi investor dalam melakukan penilaian perusahaan dan cukup handal (*reliable*) agar tercermin harga saham (Barth *et al.*, 2001), relevansi nilai merupakan operasionalisasi empiris dari tiga kriteria seperti:

- a. Informasi akuntansi dikatakan mempunyai nilai relevan ketika informasi tersebut memiliki hubungan yang signifikan terhadap harga saham;
- b. Informasi akuntansi dikatakan mempunyai nilai relevan ketika memberikan informasi yang relevan bagi investor dalam menilai perusahaan;
- c. Informasi akuntansi dikatakan mempunyai nilai relevan ketika informasi tersebut mampu mempengaruhi keputusan pihak pengguna informasi.

Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa informasi akuntansi yang relevan mampu mempengaruhi investor dalam melakukan pengambilan keputusan transaksi selama periode pengumuman. Informasi akuntansi tersebut berpengaruh terhadap harga saham, bahkan mempunyai kemampuan prediksi harga saham untuk masa yang akan datang (Francis and Schipper, 1999). Maka, relevansi nilai diartikan sebagai kemampuan informasi akuntansi dalam mencerminkan nilai suatu perusahaan yang terefleksi dalam harga saham (Hung and Subramanyam, 2007).

Studi relevansi nilai digolongkan dalam tiga kategori oleh Holthausen and Watts (2001), yaitu:

(1) *Relative Association Studies*

Studi ini bertujuan untuk membandingkan hubungan antara nilai pasar saham dengan berbagai informasi akuntansi. Pengujian pada studi ini menggunakan regresi R^2 (koefisien determinasi) untuk menilai relevansi nilai informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntansi, dimana nilai R^2 yang tinggi akan menggambarkan semakin tinggi juga relevansi informasi tersebut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Incremental Association Studies

Studi ini bertujuan untuk menguji apakah informasi akuntansi memiliki kemampuan dalam menggambarkan nilai pasar saham ataupun *return* (harga saham dan perubahan harga saham). Angka dari informasi akuntansi umumnya dikatakan relevan jika koefisien regresinya signifikan dalam statistik (berbeda dari nol).

(3) Marginal Information Content Studies

Studi ini menguji apakah sejumlah informasi akuntansi tertentu dapat menambah informasi keuangan yang diperlukan bagi investor, misalnya informasi tentang merger dan akuisisi, apakah menambah relevansi informasi laporan keuangan bagi investor. Penelitian ini biasanya melihat suatu peristiwa (*event studies*) dalam periode jangka pendek (*short window*) untuk menentukan apakah informasi akuntansi yang dikeluarkan berhubungan dengan perubahan atas reaksi investor. Dalam studi ini, reaksi atas harga saham dianggap merupakan bukti relevansi nilai.

Dalam melakukan pengujian hubungan antara informasi akuntansi dengan nilai saham diperlukan model penelitian. Terdapat dua jenis model penelitian yang pada umumnya digunakan untuk mengungkap hubungan tersebut, yaitu model harga (*price model*) dan model pengembalian (*return model*). Model harga melakukan pengujian terhadap hubungan antara harga saham, nilai buku, dan laba. Sedangkan model pengembalian melakukan pengujian terhadap hubungan tingkat pengembalian saham, laba dan perubahan laba. Kedua jenis model pengujian tersebut dikenal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai model informasi linier (*linier information model*) yang dikembangkan oleh Ohlson (1995).

Pengukuran Relevansi Nilai

Suatu informasi akuntansi disebut memiliki relevansi nilai dalam pengambilan keputusan jika informasi tersebut memiliki hubungan statistik dengan nilai perusahaan (Barth *et al.*, 2001). Nilai perusahaan adalah pengukuran ekonomi yang mencerminkan nilai pasar perusahaan (Scott, 2015). Nilai perusahaan dianggap penting bagi pengguna laporan keuangan karena dapat digunakan sebagai nilai estimasi yang andal dalam melakukan pengambilan keputusan terkait saham, keputusan kredit, penggabungan bisnis, penentuan harga saham publik, dan hal-hal penting lainnya (Subramanyam, 2014).

Beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur penilaian perusahaan yang antara lain:

a) *Price Earning Ratio* (PER)

PER mengukur jumlah uang yang rela dikeluarkan oleh investor untuk setiap dolar yang dilaporkan perusahaan. Tingkat rasio ini menunjukkan kepercayaan yang dimiliki investor terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang. PER dapat dihitung dengan membandingkan harga pasar per lembar saham dengan laba per saham (Gitman dan Zutter, 2015). Selain itu, bisa juga diukur dengan membandingkan nilai pasar dari ekuitas dengan laba bersih (Subramanyam, 2014). Rumus yang digunakan untuk rasio ini adalah:

$$PER = \frac{\text{Market price per share}}{\text{Earnings per share}}$$

b) *Price to Book Value* (PBV)



PBV memberikan penilaian tentang bagaimana investor memandang kinerja perusahaan. Rasio ini diukur dengan harga saham yang ada di pasar dengan cara dibandingkan dengan nilai buku saham. Perusahaan yang dianggap baik oleh investor adalah perusahaan dengan risiko rendah dan pertumbuhan yang tinggi dan akan memiliki rasio PBV yang tinggi. Perusahaan yang mengharapkan pengembalian yang relatif tinggi terhadap risiko, biasanya akan menjual sahamnya dengan kelipatan rasio PBV yang lebih tinggi (Gitman dan Zutter, 2015; Brigham dan Houston, 2019; Subramanyam, 2014).

$$PBV = \frac{\text{Market value of equity}}{\text{Book value of equity}}$$

c) *Tobin's Q*

Tobin's Q adalah suatu rasio yang dikembangkan oleh Profesor James Tobin (1967) yang berfungsi sebagai proksi nilai perusahaan dari perspektif investor yang dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar aset perusahaan dengan nilai pengganti (*replacement value*) dari aset tersebut (Wolfe dan Aidar Sauaia, 2005). Tobin's Q dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{(MVS + MVD)}{RVA}$$

Keterangan:

Q = nilai perusahaan yang diukur menggunakan rasio q

MVS = nilai pasar dari seluruh saham yang beredar

MVD = nilai pasar dari seluruh hutang

RVA = nilai pengganti asset

Model Ohlson (1995) pada hakikatnya menghubungkan nilai pasar perusahaan (harga saham) dengan laba dan nilai buku serta informasi lainnya yang



kemungkinan dapat mempengaruhi relevansi nilai informasi akuntansi. Dengan unsur – unsur tersebut, telah dirumuskan model regresi untuk pilihan relevansi nilai menggunakan harga saham sebagai berikut:

$$P_t = a_1x_t + a_2b_t + a_3v_t + e_t$$

Keterangan:

- P_t = harga saham perusahaan pada tahun t
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ = koefisien / *slope*
- x_t = laba akuntansi pada tahun t
- b_t = nilai buku ekuitas pada tahun t
- v_t = informasi selain laba dan nilai buku ekuitas (dapat berupa informasi apapun yang diprediksi memengaruhi harga saham) pada tahun t
- e_t = *error*

Model Ohlson mensyaratkan hubungan nilai buku ekuitas dengan laba dan informasi lainnya harus bersifat hubungan surplus bersih (*clean surplus relationship*). Keunggulan dari model Ohlson adalah model tersebut dapat menjelaskan kerangka konseptual yang memiliki hubungan dengan nilai pasar dari perusahaan dengan informasi keuangan masa lalu dan masa depan pada perusahaan, yaitu seperti laba bersih yang diharapkan saat ini dan masa depan, nilai buku ekuitas, serta dividen (Gama *et al.*, 2017).

Return saham adalah pengembalian hasil yang diterima oleh para pemegang saham dari investasi yang telah dilakukan. *Return* saham didapat dengan cara menghitung selisih harga saham periode berjalan dengan periode sebelumnya, dapat diformulasikan sebagai berikut (Ross *et al.*, 2003):

$$R_{it} = \frac{P_{it} - P_{it-1}}{P_{it-1}}$$

Keterangan:

- R_{it} = *return* saham i periode t

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



P_{it} = harga saham i periode t

P_{it-1} = harga saham i periode t-1

Selain itu, pada *retun model*, hubungan nonlinier antara laba dan kinerja saham boleh diukur menggunakan *Cumulative Abnormal Return* (CAR). Roggi dan Giannozzi (2015) menggunakan CAR dalam melakukan penelitiannya untuk mengukur reaksi investor atas hirarki nilai wajar yang dirumuskan seperti berikut:

$$CAR_{i(t_1,t_2)} = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{it}$$

Keterangan:

$CAR_{i(t_1,t_2)}$ = *Cumulative Abnormal Return* saham i dari periode t_1 sampai dengan t_2

AR_{it} = *Abnormal Return* saham i pada hari ke t yang dihitung dengan rumus:

$R_{it} - RM_t$ dengan R_{it} merupakan *return* saham individu dan RM_t merupakan *return* pasar

2. Akuntansi Nilai Wajar

Pengertian Nilai Wajar

Implementasi penggunaan nilai wajar dikatakan mengalami perubahan signifikan selama beberapa dekade terakhir dimana frekuensi penerapan nilai wajar lebih sering digunakan daripada sebelumnya (Sundgren., 2013). Hal ini didukung oleh fakta yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi biaya historis tidak lagi relevan karena memudarkan sumber data laporan keuangan yang disebabkan karena akuntan yang lebih mengutamakan reliabilitas daripada relevansi dan menerapkan konservatisme (Barlev dan Haddad, 2003).



Secara khusus, definisi, pengukuran dan ketentuan pengungkapan nilai wajar

diatur dalam IFRS 13: *Fair Value Measurement*. Hingga saat ini, definisi yang ditetapkan dan disepakati untuk nilai wajar dalam IFRS 13 adalah:

“The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date (ie exit price)”.

Meskipun ada beberapa perbedaan beberapa kata atau istilah dalam pengertian nilai wajar pada FASB dan IFRS, namun IFRS 13 telah diadopsi oleh banyak negara termasuk Indonesia sehingga secara umum memiliki makna yang sama. Pada tahun 2015, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengukuhkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 68 (2015): *Pengukuran Nilai Wajar* sebagai acuan tunggal akuntansi nilai wajar di Indonesia dengan PSAK lain sebagai pendukungnya.

Sesuai hasil serapan dari IFRS 13, nilai wajar menurut PSAK 68 (2015: 68.6) adalah:

“Harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama (atau pasar yang paling menguntungkan) pada tanggal pengukuran berdasarkan kondisi pasar saat ini (yaitu harga keluaran) terlepas apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain.”

Menurut Subramanyam (2014) terdapat lima aspek yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Pada Tanggal Pengukuran

Aset atau liabilitas nilai wajar ditentukan saat tanggal pengukuran, yaitu tanggal neraca – bukan tanggal dimana aset tersebut pada awalnya dibeli (atau liabilitas awalnya diasumsikan).

2) Transaksi Hipotesis

Transaksi yang menjadi dasar penilaian adalah hipotesis. Tidak ada penjualan aktual dari aset (atau transfer dari liabilitas) perlu terjadi. Dengan kata lain, nilai wajar ditentukan “seolah-olah” aset yang dijual pada tanggal pilihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



3) Transaksi Teratur

Gagasan dari transaksi “teratur” menghilangkan pertukaran yang terjadi di bawah kondisi yang tidak biasa, seperti di bawah paksaan. Hal tersebut memastikan bahwa nilai wajar merupakan harga pertukaran dalam keadaan normal, seperti harga pasar dalam pasar aktif (sering terjadi transaksi).

4) Pengukuran Berbasis Pasar

Nilai wajar aset harus menunjukkan harga yang pelaku pasar akan bayarkan untuk aset (atau permintaan untuk kewajiban) dibandingkan nilai yang dihasilkan melalui penggunaan yang unik dari aset dalam suatu bidang usaha yang spesifik.

5) Harga Keluar (*exit price*)

Nilai wajar aset adalah harga hipotesis di mana suatu perusahaan dapat menjual aset (*exit price*), bukanlah harga yang harus dibayar untuk membeli aset (*entry price*). Demikian juga, untuk liabilitas, nilai wajar adalah harga di mana perusahaan dapat mentransferliabilitas kepada pihak ketiga.

Pengukuran Akuntansi Nilai Wajar

Penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan semakin meningkat. Namun, pengukuran berdasarkan nilai wajar memperkenalkan peningkatan subjektivitas dalam pelaporan akuntansi ketika informasi nilai wajarnya tidak tersedia (Kieso et al., 2018). Dalam meningkatkan konsistensi dan keterbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, maka ditetapkan hirarki nilai wajar yang dikategorikan dalam tiga tingkatan untuk menentukan nilai wajar suatu instrumen keuangan (PSAK 68 dan IFRS 13, 2013) ketiga tingkatan ini adalah:

(1) Level 1

Merupakan harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang indentik yang dapat di akses oleh entitas pada tanggal pengukuran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Harga kuotasian di pasar aktif menyajikan bukti yang paling andal dari nilai wajar dan digunakan tanpa penyesuaian untuk mengukur nilai wajar apabila tersedia, dalam *level 1* ini terdapat pengecualian: pertama, ketika entitas memiliki aset dan kewajiban serupa dalam jumlah besar yang diukur pada nilai wajar dan harga kuotasian dalam pasar aktif yang tersedia tetapi tidak dapat diakses untuk individual. Kedua, ketika harga kuotasian pada pasar aktif tidak mencerminkan nilai wajar kewajiban pada tanggal pengukuran. Ketiga, ketika mengukur nilai wajar kewajiban atau instrumen ekuitas milik entitas sendiri dengan harga kuotasian yang identik diperdagangkan di pasar aktif dan harga tersebut perlu untuk disesuaikan untuk faktor yang spesifik.

(2) Level 2

Merupakan input selain harga kuotasian yang termasuk dalam *level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung dan tidak langsung. Jika aset atau kewajiban memiliki persyaratan (kontraktual) yang spesifik, maka *level 2* harus dapat diobservasi untuk keseluruhan jangka waktu yang substansial dari aset atau liabilitas tersebut. *Input level 2* termasuk kondisi berikut:

- a) Harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang serupa pada pasar aktif.
- b) Harga kuotasian untuk aset atau liabilitas yang identik atau serupa pada pasar yang tidak aktif.
- c) *Input* selain harga kuotasian yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas; suku bunga dan kurva imbal hasil yang dapat diobservasi pada interval kuotasi umum, volatilitas, dan *credit spreads*.
- d) Input yang diperkuat oleh pasar (*market-corroborated inputs*).

(3) Level 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan *input* yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas. *Input* yang tidak dapat diobservasi digunakan untuk mengukur nilai wajar sejauh *input* yang diobservasi yang relevan tidak tersedia, sehingga memungkinkan adanya situasi di mana terdapat sedikit aktivitas pasar untuk aset atau liabilitas saat tanggal pengukuran. *Input* yang tidak dapat diobservasi harus merefleksikan asumsi yang akan digunakan oleh pelaku pasar saat menentukan harga aset atau liabilitas termasuk asumsi tentang risiko.

Hierarki nilai wajar memberikan prioritas tertinggi untuk harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik (level 1) dan prioritas terendah kepada *input* yang tidak dapat teramati (level 3). PSAK No. 68 tahun 2013 menjelaskan teknik yang sesuai untuk menentukan kategori *input*, yaitu terdapat tiga teknik penilaian sebagai berikut:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)

Menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas atau sekelompok aset atau liabilitas yang identik atau sebanding seperti bisnis.

2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)

Merupakan suatu teknik penilaian yang menunjukkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) suatu aset atau sering disebut biaya pengganti saat ini.

3. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)

Mengkonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) untuk suatu jumlah tunggal saat ini yang didiskontokan. Saat pendekatan penghasilan digunakan, maka pengukuran nilai wajar akan mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan kategori input tersebut, ketiga teknik tersebut dapat digunakan secara tunggal maupun bersamaan sesuai situasi yang ada untuk mencapai tujuan utama yaitu memaksimalkan penggunaan input yang relevan dan dapat diobservasi. Penentuan dengan pendekatan dan hirarki dalam banyak kasus akan serupa dengan nilai wajar aset. Namun untuk beberapa kondisi seperti saat dibawah tekanan kesulitan finansial atau dalam transaksi dengan pihak yang berelasi memungkinkan terjadinya perbedaan harga dengan nilai wajarnya. Jika hal ini terjadi, maka perusahaan wajib mencatat keuntungan atau kerugian atas pengukuran dari nilai wajar aset tersebut.

Perdebatan Akuntansi Nilai Wajar

Berkaitan dengan definisi dan pengukuran dari akuntansi nilai wajar, telah terjadi perdebatan dalam penerapan akuntansi nilai wajar. Terdapat pihak yang pro maupun kontra yang memiliki pandangan masing – masing terhadap akuntansi nilai wajar. Para penyusun standar akuntansi berharap agar akuntansi nilai wajar dapat semakin kuat dan transparan dalam menggambarkan situasi dan kondisi suatu perusahaan, baik kinerja, nilai aset dan segala bentuk risiko yang ada.

Dalam membahas pro dan kontra akuntansi nilai wajar, pihak pendukung akuntansi nilai wajar lainnya juga menyatakan bahwa penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi karena aset dan kewajiban menunjukkan informasi saat ini berdasarkan harga pasar (Barth, 2006; Linsmeier, 2011). Jika nilai wajar diestimasi dengan harga pasar yang diperoleh dari pasar yang aktif, terinformasi dengan baik, dan kompetitif, maka akan memberikan nilai yang objektif yang bebas dari subjektifitas (Zijl dan Whittington, 2006). Pihak yang menentang menyatakan bahwa akuntansi nilai wajar dikatakan menjauhi nilai intrinsik karena masalah likuiditas dan adanya kekhawatiran bahwa nilai wajar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



memperburuk kondisi krisis keuangan (Allen dan Carletti, 2008). Selanjutnya, Penman (2007) menyatakan bahwa meskipun benar akuntansi nilai wajar secara konseptual adalah nilai tambah, namun implementasinya gagal dan seluruh proses penilaian menjadi kurang dapat diandalkan ketika hubungan antara *exit price* dan nilai wajar terhadap pemegang saham tidak berlaku.

Implementasi akuntansi nilai wajar memiliki dampak yang signifikan terhadap analisis laporan keuangan. Menurut Subramanyam (2014) terdapat manfaat dan kelemahan yang dihadapi dalam penggunaan akuntansi nilai wajar. Manfaat utama dari implementasi akuntansi nilai wajar adalah:

(1) Mencerminkan informasi saat ini

Tidak ada yang menduga bahwa akuntansi nilai wajar mencerminkan informasi terkini mengenai nilai aset dan liabilitas dalam neraca. Sebaliknya, informasi dari biaya historis dapat ketinggalan zaman, sehingga menimbulkan apa yang dapat disebut aset atau liabilitas “tersembunyi”. Dengan lebih mencerminkan informasi saat ini, maka akuntansi nilai wajar dianggap lebih relevan dalam pengambilan keputusan.

(2) Kriteria pengukuran yang konsisten

Keuntungan lainnya yang dikhawatirkan penyusun standar adalah akuntansi nilai wajar menyajikan kriteria pengukuran konseptual yang konsisten untuk aset dan kewajiban. Saat ini, akuntansi keuangan masih menggunakan pendekatan *mish-mash* yang disebut juga model atribut campuran. Misalnya, aset tetap seperti tanah dan bangunan yang diukur dengan biaya historis, tetapi aset keuangan seperti surat berharga dicatat pada harga pasar saat ini. Bahkan untuk item yang sama, kriteria yang digunakan tidak konsisten karena konservatisme, misalnya, persediaan biasanya dinilai pada cost kecuali jika harga pasar turun di bawah cost.



Dengan akuntansi nilai wajar, diharapkan semua aset dan kewajiban akan diukur dengan menggunakan kriteria yang konsisten dan kriteria konseptual yang menarik.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(3) Keterbandingan

Karena aset dan kewajiban diukur secara tetap, maka dapat dikatakan akuntansi nilai wajar akan meningkatkan keterbandingan, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari perusahaan yang berbeda.

(4) Tidak ada bias konservatif

Akuntansi nilai wajar diharapkan dapat menghilangkan bias konservatif dalam akuntansi. Sehingga mampu meningkatkan keandalan atas netralitas, yaitu informasi tanpa bias.

(5) Lebih bermanfaat dalam menganalisis ekuitas

Salah satu keluhan dari akuntansi tradisional adalah sebagian besar bertujuan dalam memberikan informasi yang bermanfaat untuk analisis kredit. Misalnya, penggunaan biaya historis konservatif lebih dirancang untuk memberikan perkiraan risiko kerugian bisnis daripada mengevaluasi potensi keuntungannya. Banyak yang berpendapat jika mengadopsi model nilai wajar akan membuat akuntansi lebih bermanfaat dalam menganalisis ekuitas.

Kelemahan utama dalam penerapan akuntansi nilai wajar adalah:

(1) Objektivitas yang rendah

Kritik utama terhadap akuntansi nilai wajar yaitu kurang dapat diandalkan karena disebabkan kurangnya objektivitas. Masalah tersebut sangat berkaitan dengan jenis input yang digunakan. Tidak ada yang bisa mempertanyakan keobjektivisan baik *input* level 1 maupun level 3. Kerena *input* level 3 tidak dapat diobservasi dan berdasarkan pada asumsi yang dibuat oleh manajer, banyak yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berpendapat bahwa penggunaan input level 3 secara ekstensif akan menurunkan keandalan informasi laporan keuangan, terutama untuk aset dan kewajiban operasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(2) Kerentanan terhadap manipulasi

Penurunan objektivitas berkaitan erat dalam meningkatkan kemampuan manajer untuk memanipulasi laporan keuangan. Masalah berkaitan erat dengan penggunaan *input* level 3, karena *input* level 1 dan level 2 nilai wajar lebih sulit untuk dimanipulasi.

(3) Penggunaan *input* level 3

Krisis kredit yang baru – baru ini di Amerika Serikat telah menggunakan *input* level 3 secara ekstensif dikarenakan likuiditas yang buruk di pasar kredit. Kebutuhan untuk menggunakan *input* level 3 jelas diharapkan lebih besar untuk aset dan kewajiban operasi. Jika input level 3 digunakan secara luas, banyak yang percaya bahwa model akuntansi nilai wajar akan mengurangi keandalan dalam pelaporan keuangan.

(4) Kurangnya konservatisme

Banyak akademisi serta praktisi yang lebih memilih akuntansi konservatif. Ada dua manfaat utama dari konservatisme, yaitu: pertama, menutupi bias pada manajemen untuk melaporkan pendapatan yang lebih tinggi atau aktiva bersih yang lebih tinggi. Kedua, penting bagi analisis kredit dan kontrak utang karena kreditur lebih memilih laporan keuangan yang menyoroti risiko *downside*. Pendukung akuntansi konservatif khawatir dengan menggunakan model nilai wajar akan menyebabkan laporan keuangan harus disiapkan secara agresif, sehingga mengurangi manfaat bagi para kreditur.

(5) Volatilitas laba yang berlebihan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam model akuntansi nilai wajar, laba hanyalah perubahan nilai dari aset dan kewajiban. Karena aset (atau kewajiban) umumnya berkaitan erat dengan laba dan karena nilai wajar dapat berubah secara signifikan kapan saja, maka perubahan nilai wajar aset dapat menyebabkan pelaporan laba menjadi terlalu *volatile*. Sehingga dikhawatirkan laba akan menjadi kurang bermanfaat untuk melakukan analisis. Penyusun standar menyadari masalah tersebut dan telah memulai sebuah proyek untuk mengubah penyajian laporan keuangan, juga melaporkan pilihan laba menengah yang merefleksikan operasi perusahaan.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Pengertian

Pada masa ini, tata kelola perusahaan menjadi lebih relevan karena perusahaan tumbuh dan berkembang baik di negara maju maupun negara berkembang. Menurut (Shleifer and Vishny 1997:737) tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai:

“dealing with the ways that suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return on their investment.” Turnbull (1997:181) juga mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai:

“as all the influences affecting the institutional process, including those pointing to the controllers and/or regulators, involved in organising the production, sale of goods and services.”

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* (2002) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Peraturan Menteri BUMN 01/MBU/2011 mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



governance) sebagai prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

Tata kelola perusahaan berfokus pada struktur dan proses untuk arah bisnis dan perusahaan manajemen yang melibatkan hubungan antara sistem pengendalian perusahaan, peran dewan direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan (Vo dan Nguyen, 2014). Definisi yang diungkapkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD, 2015:9) dalam *Principles of Corporate Governance* yaitu:

“Corporate governance involves a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance are determined.”

Menurut Gitman and Zutter (2015), tata kelola perusahaan mengacu pada aturan, proses, dan hukum di mana perusahaan dioperasikan, dikendalikan, dan diatur. Tata kelola perusahaan mendefinisikan hak dan tanggung jawab para anggota perusahaan seperti pemegang saham, dewan direksi, pejabat dan manajer, dan pemangku kepentingan lainnya serta aturan dan prosedur untuk membuat keputusan perusahaan. Sementara, Nishat dan Shaheen (2006) menganggap tata kelola perusahaan sebagai praktik dan pengaturan di mana bisnis perusahaan dijalankan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Dari beberapa definisi tata kelola perusahaan, dapat diintisarikan bahwa tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders dan mengatur hubungan dan tanggung jawab antara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



karyawan, kreditur dan para pemegang kepentingan dalam mengendalikan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Prinsip – Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006, dalam menuju tata kelola perusahaan yang baik terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi seperti:

1) **Transparency (keterbukaan informasi)**

Keterbukaan dalam menyampaikan informasi serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Dalam mewujudkan transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

2) **Accountability (akuntabilitas)**

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip accountability (akuntabilitas) ini diterapkan secara efektif, maka perusahaan akan terhindar dari agency problem (benturan kepentingan peran).

3) **Responsibility (Pertanggungjawaban)**

Kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4) **Independency (Kemandirian)**

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



5) *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

- Ⓒ Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundangundangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan prudent (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara fair (jujur dan adil).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Suatu mekanisme dibutuhkan agar aktivitas di dalam suatu organisasi dapat berjalan dengan sehat, sesuai arah yang ditetapkan. Dalam hal ini mekanisme *corporate governance* dapat didefinisikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* pada sebuah organisasi (Syakhroza, 2002).

Mekanisme tata kelola perusahaan dibagi menjadi dua bagian yaitu, internal dan eksternal. Komponen yang termasuk dalam kategori internal adalah komponen-komponen yang bersinggungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan, yaitu terdiri dari manajemen yang berhubungan dengan pengambilan keputusan operasional perusahaan, dan dewan direksi serta lainnya (pemegang saham dan dewan komisaris beserta komite-komitennya) yang berhubungan dengan keputusan-keputusan perusahaan yang sifatnya lebih strategis. Sedangkan, mekanisme eksternal adalah komponen-komponen yang tidak bersinggungan langsung dengan proses pengambilan keputusan perusahaan. Mekanisme pengendalian eksternal tidak lagi hanya berupa pasar modal saja, tetapi juga perbankan yang memberi suntikan dana, masyarakat selaku konsumen, *supplier*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tenaga kerja, ataupun komunitas lokal, pemerintah selaku regulator, serta *stakeholder* lainnya (Syakhroza, 2003).

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Dewan komisaris merupakan inti dari tata kelola perusahaan yang baik. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2006) mendefinisikan dewan komisaris sebagai salah satu organ perusahaan yang penting dalam tata kelola perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk melakukan pengendalian dan pemantauan yang semakin efektif (Collier dan Gregory, 1999).

Fungsi utama dari dewan komisaris, antara lain (OECD, 2015):

- 1) Meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana tindakan utama, kebijakan dan prosedur manajemen risiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis; menetapkan tujuan kinerja; memantau implementasi dan kinerja perusahaan; dan mengawasi pengeluaran modal besar, akuisisi dan divestasi.
- 2) Memantau efektivitas praktik tata kelola perusahaan dan membuat perubahan yang dibutuhkan.
- 3) Memilih, memberikan kompensasi, memantau dan, mengganti eksekutif utama dan mengawasi perencanaan.
- 4) Menyesuaikan remunerasi eksekutif utama dan dewan dengan jangka panjang kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.
- 5) Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara formal dan transparan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6) Memantau dan mengelola potensi konflik kepentingan manajemen, anggota dewan dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan perusahaan aset dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak terkait.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

7) Memastikan integritas akuntansi dan keuangan perusahaan sistem pelaporan, termasuk audit independen, dan yang sesuai ada sistem pengendalian, khususnya, sistem untuk manajemen risiko, keuangan dan pengendalian operasional, dan kepatuhan terhadap hukum dan standar yang relevan.

8) Mengawasi proses pengungkapan dan komunikasi.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan (KNKG,2006). Keberadaan komisaris independen telah diatur melalui peraturan Bursa Efek Jakarta (BEJ) tanggal 1 Juli 2000, diungkapkan bahwa perusahaan yang tercatat di Bursa Efek wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Berikut ini beberapa kriteria lain mengenai komisaris independen:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- b) Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- c) Komisaris independen tidak berkedudukan rangkap di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan.
- d) Komisaris independen harus memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- e) Komisaris independen diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris dapat membentuk komite-komitennya. Usulan dari komite disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh keputusan. Salah satu komite penunjang dewan komisaris yaitu komite audit. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-643/BL/2012, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen. Anggota komite audit wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

Dalam membantu dewan komisaris, komite audit bertugas memastikan (KNKG, 2006):

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a) Komite audit memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Komite audit memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik.
- c) Komite audit memastikan pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- d) Komite audit memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

4. Teori – teori yang mendasari

Teori-teori yang mendasari penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Teori Hipotesis Efisiensi Pasar (*Efficient Market Hypothesis*)

Konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Eugene F. Fama (1970) yang mengatakan bahwa suatu pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh “*fully reflect*” semua informasi yang ada. Aspek “*fully reflect*” dan “*available information*” menunjukkan bahwa harga sekuritas secara akurat mampu mencerminkan informasi yang ada, dan pasar dikatakan efisien jika menggunakan informasi yang tersedia, serta investor dapat mengekspektasi harga dari sekuritas yang berkaitan. Pasar menjadi tempat untuk menggabungkan seluruh informasi yang tersebar (*aggregation of information*) dan merefleksikan dalam harga yang tercermin di pasar (Fama, 1970).

Terdapat tiga bentuk umum pasar efisiensi yang terkait erat dengan sejauh mana penyerapan informasi terjadi di pasar yaitu: bentuk lemah (*weak form*), bentuk semi-kuat (*semi-strong form*), dan bentuk kuat (*strong form*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk Lemah (*weak form*)



Pasar disebut efisien dalam bentuk lemah jika harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang terkandung dalam pergerakan harga historis. Harga historis tidak bisa digunakan untuk mengestimasi harga masa depan, sehingga data tidak bermanfaat lagi dalam memprediksi perubahan harga masa di masa depan.

C Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Bentuk Semi-Kuat (*semi-strong form*)

Pasar disebut efisien dalam bentuk semi-kuat jika harga sekuritas mencerminkan secara penuh (*fully reflect*) semua informasi yang tersedia secara publik termasuk data statemen keuangan. Bentuk pasar ini merupakan teori pasar efisiensi yang paling mendekati realita.

3. Bentuk Kuat (*strong form*)

Pasar disebut efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas mencerminkan secara penuh semua informasi termasuk informasi publik dan yang tidak dipublikasikan (*private*).

Dari tiga bentuk umum pasar efisiensi, bentuk semi kuat (*semi-strong form*) merupakan bentuk pasar efisien yang berhubungan langsung dengan penelitian akuntansi, karena informasi akuntansi adalah bagian dari informasi publik yang tersedia. Menurut Subramanyam (2014) kelainan nilai dari harga saham telah ditemukan dan dapat menyarankan agar investor mendapatkan keuntungan yang lebih banyak melalui pertukaran sederhana yang strategis. Sebagai pendekatan pertama, harga saham saat ini merupakan perkiraan yang layak untuk menilai perusahaan. Sehingga penggunaan nilai wajar yang berlandaskan pada pergerakan harga di pasar digunakan sebagai acuan dalam mengukur instrumen keuangan dalam rangka memenuhi fungsi utama laporan keuangan, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dalam mengambil keputusan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



Fungsi utama dari pasar efisien adalah pasar yang harga sekuritasnya mampu memberikan sinyal akurat dalam mengalokasi sumber daya seperti membuat keputusan investasi dan investor dapat memilih di antara sekuritas yang mewakili kepemilikan aktivitas perusahaan. Hipotesis tersebut didukung oleh teori sinyal (*signaling theory*). Brigham dan Houston (2019) mendefinisikan teori sinyal memberikan tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam memberi petunjuk kepada investor tentang prospek perusahaan. Sinyal yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang bagus di masa mendatang dan mencerminkan kinerja atau nilai perusahaan yang baik. Investor akan membeli lebih banyak saham yang akhirnya akan mengakibatkan harga saham perusahaan naik. Sinyal buruk yang ditangkap oleh investor akan membuat investor meragukan kemampuan perusahaan di masa depan.

Selanjutnya, teori surplus bersih (*clean surplus theory*) Ohlson (1995) memberikan kerangka kerja yang konsisten dengan pendekatan pengukuran dengan menunjukkan bagaimana nilai pasar perusahaan dapat ditunjukkan melalui komponen-komponen yang tersedia pada laporan laba rugi. Dalam Scott (2015) dinyatakan bahwa teori ini mengasumsikan kondisi ideal di pasar modal dan berhasil dalam menjelaskan dan memprediksi nilai perusahaan secara aktual.

Teori surplus bersih menunjukkan bahwa informasi akuntansi memiliki fungsi prediksi dan analisis yang dapat digunakan untuk menggambarkan nilai dari suatu perusahaan. Maka, laporan keuangan berperan dalam memberikan informasi yang nantinya akan berpengaruh terhadap keputusan para pengguna. Oleh sebab itu, laporan keuangan tidak hanya berperan sebagai suatu perspektif informasi bagi pihak yang berkepentingan, namun dikaitkan dengan perspektif pengukuran. Kondisi inilah yang menyatakan bahwa data-data akuntansi tersebut memiliki relevansi nilai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Konsep relevansi nilai tidak jauh dari kriteria relevan dari standar akuntansi, karena jumlah suatu angka akuntansi akan relevan jika angka akuntansi tersebut mencerminkan informasi yang relevan dengan penilaian perusahaan. Dengan demikian, nilai buku ekuitas dan laba merupakan variabel dasar dalam menentukan nilai perusahaan.

Kemudian Ohlson mengembangkan suatu model tentang nilai pasar perusahaan yang dijelaskan dengan laba periode berjalan dan masa yang akan datang, nilai buku ekuitas dan dividen. Namun, karena belum tercermin dalam laporan keuangan, kebijakan dividen dapat disatukan dalam nilai buku, yakni sebagai pengurang nilai buku tanpa mengurangi laba. Kemudian, Gama *et al.*, (2017) mengungkapkan bahwa berdasarkan asumsi semi-kuat efisiensi pasar, informasi lain dapat dijelaskan sebagai harga yang cenderung secara instan mencerminkan semua informasi yang tersedia kepada publik.

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemilik saham (*principal*). Hubungan keagenan adalah suatu kontrak dimana satu orang atau beberapa orang mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan tugas demi kepentingan *principal*, termasuk pendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Bersamaan dengan munculnya hubungan agensi, timbul sebuah biaya yang disebut biaya agensi. Biaya ini adalah *monitoring* yang dikeluarkan prinsipal, *bonding cost* yang dikeluarkan agen dan kerugian residual. Biaya tersebut berkaitan dengan insentif dikeluarkan dengan tujuan meminimalisir konflik agensi yang didasari kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling, 1976).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Scott (2015) menyatakan bahwa perusahaan memiliki banyak kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan krediturnya. Dalam hal ini, *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak (*full information*) dibandingkan dengan *principal*, sehingga mencirikan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi didefinisikan sebagai situasi di mana masing-masing pihak memiliki jumlah dan jenis informasi yang tidak sama dari waktu ke waktu (Sceral *et al.*, 2018).

Scott (2015) membagi asimetri informasi menjadi 2 macam, yaitu:

- a. *Adverse selection*, dimana para manajer perusahaan dan orang-orang dalam lainnya, akan memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan investor luar.
- b. *Moral hazard*, dimana satu pihak dalam hubungan kontraktual yaitu manajer mengambil tindakan yang tidak dapat diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman.

Selain itu, *agency theory* juga menyebutkan bahwa agen tidak selalu bertindak demi keinginan prinsipal. Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, sebagai manusia, agen dapat bertindak *opportunistic behavior* dan *efficiency contracting*, dimana dalam perspektif *opportunistic*, manajemen cenderung mengutamakan kepentingan pribadinya dengan mengungkapkan informasi yang dapat menguntungkan perusahaan. Sedangkan dalam perspektif *efficiency*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



manajemen akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat meminimalisir biaya agensi guna mengoptimalisasikan nilai perusahaan (Holthausen, 1990).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sweet dan Zhang (2015) bertujuan untuk menguji relevansi nilai aset dan liabilitas dari ketiga tingkat dalam hirarki nilai wajar. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel 186 institusi perbankan dengan menggunakan data triwulan pada tahun 2008 hingga 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai wajar aset dan liabilitas *level 3* lebih rendah dibandingkan dengan relevansi nilai wajar aset dan liabilitas pada *level 1* dan *level 2*.

Penelitian yang dilakukan oleh Daas dan Jammal (2018) bertujuan untuk menyelidiki apakah hierarki nilai wajar memiliki pengaruh terhadap relevansi nilai. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 14 institusi organisasi keuangan palestina yang memasukkan portofolio di bawah Palestine Exchange (PEX) dari periode 2011 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan hanya nilai wajar pada *level 3* yang memiliki pengaruh positif dan signifikan dengan harga saham. Penelitian tersebut juga menunjukkan koefisien estimasi *mark-to-model* pada *level 3* secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan *mark-to-market* pada *level 1* dan *level 2*.

Penelitian yang dilakukan oleh Patrick Bosch (2012) bertujuan untuk menguji apakah aset dan liabilitas dari seluruh level dalam hirarki nilai wajar memiliki nilai yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel dari 408 bank di Eropa pada periode 2006 hingga 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua nilai wajar aset dan liabilitas termasuk *level 3* nilai wajar memiliki nilai yang relevan dari semua level pengukuran nilai yang relevan. Akan tetapi, *level 3* nilai wajar dirasakan kurang dapat diandalkan oleh pasar modal dibandingkan dengan *level 1* dan *level 2*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI (Institusi Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian yang dilakukan oleh Goh et al. (2015) menguji hubungan antara harga saham dengan nilai wajar aset pada bank yang diprosikan dengan level yang berbeda. Penelitian ini menggunakan sampel 6893 laporan keuangan kuartal bank di Amerika periode 2008-2011 pada saham yang terdaftar pada NYSE, AMEX dan NASDAQ. Hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai wajar aset level 1 lebih tinggi dibanding nilai wajar aset level 2, namun keduanya secara signifikan lebih tinggi dibanding nilai wajar aset level 3.

Penelitian yang dilakukan Song *et al* (2010) yang menguji relevansi nilai pengukuran nilai wajar untuk ketiga level pengungkapan dan menguji apakah relevansi nilai dari nilai wajar bergantung pada mekanisme tata kelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 1260 laporan keuangan kuartal pada industri perbankan di Amerika tahun 2007-2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relevansi nilai di level 1 dan level 2 nilai wajar lebih besar daripada relevansi nilai pada level 3 nilai wajar, serta tata kelola perusahaan berdampak signifikan terhadap level 2 dan level 3 nilai wajar. Hasil ini menjelaskan pentingnya mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengurangi masalah asimetri informasi yang berhubungan dengan input level 2 dan level 3.

Penelitian yang dilakukan Billiot et al (2017) menguji relevansi nilai pada pengukuran aset dan liabilitas nilai wajar untuk perusahaan non-keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non keuangan untuk tahun fiskal 2008-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengukuran aset nilai wajar *level 1* dan *level 2* adalah nilai yang relevan dan berhubungan positif dengan harga saham namun, pengukuran nilai wajar *level 3* berhubungan negatif dengan harga saham karena ini adalah harga yang di estimasi dan mengandalkan input yang tidak dapat diobservasi oleh perusahaan, seringkali pada pasar yang tidak aktif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ringkasan hasil penelitian terdahulu beserta pengukuran variabel dan hasil penelitiannya dapat dilihat pada lampiran 1.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini menjelaskan hubungan antar variabel-variabel berdasarkan teori-teori yang ada dan penelitian terdahulu yang akan diteliti, yaitu:

1. Relevansi nilai wajar aset dan liabilitas pada level 1, level 2 dan level 3

Penggunaan akuntansi nilai wajar telah menjadi subyek perdebatan karena *trade-off* antara relevansi dan keandalan dalam pelaporan keuangan. Sementara akuntansi nilai wajar berpotensi memberikan informasi yang lebih relevan dengan menilai aset dan liabilitas dengan nilai sekarang dibandingkan dengan biaya historis. Hal tersebut berkaitan dengan teori efisiensi pasar yang menjelaskan bahwa nilai wajar dapat merefleksikan seluruh informasi yang tersedia bagi investor. Akuntansi nilai wajar menjadi lebih penting dalam pelaporan keuangan karena dapat memberikan informasi yang relevan dan berguna bagi investor atau dengan kata lain penggunaan akuntansi nilai wajar memiliki relevansi nilai. Informasi akuntansi dikatakan memiliki relevansi nilai jika informasi akuntansi tersebut dapat memprediksi nilai perusahaan, yang terefleksi dalam perubahan harga saham (Barth et al., 2001).

Teori surplus bersih menyatakan bahwa ada informasi lainnya yang relevan dalam pengambilan keputusan selain informasi laba dan nilai buku ekuitas. Salah satu informasi lainnya yang penting adalah informasi nilai wajar aset dan liabilitas perusahaan. Penerapan nilai wajar pada instrumen keuangan di berbagai negara memicu para peneliti untuk menguji dampak penggunaan pengukuran nilai wajar terhadap relevansi nilai dari laporan keuangan. Pengukuran nilai wajar seringkali memerlukan estimasi yang menurunkan keandalan pengukuran yang dilaporkan dalam neraca. Hal ini terutama berlaku untuk pengukuran nilai wajar level 3 yang mengandalkan input yang tidak dapat



diobservasi yang digunakan oleh perusahaan, seringkali di pasar yang tidak aktif. Hierarki ini didasarkan pada pengukuran nilai wajar pada input yang akan digunakan dalam mengukur aset dan liabilitas nilai wajar dan memberikan tiga tingkatan. Tingkatan *level* tersebut didasarkan pada keandalan input dengan input level 1 menjadi yang paling andal. Input level 1 memiliki subjektivitas paling sedikit karena didasarkan pada harga kuotasian di pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik. Input level 2 didasarkan pada input yang dapat diamati, tetapi untuk aset dan liabilitas serupa, bukan aset identik, atau untuk aset identik di pasar yang tidak aktif. Oleh karena itu, mengidentifikasi input level 2 memperkenalkan beberapa level subjektivitas. Terakhir, input level 3 tidak dapat diobservasi dan membutuhkan estimasi terbesar oleh manajemen.

Konsisten dengan teori sinyal, pengukuran nilai wajar level 3 untuk harga yang tidak dapat diobservasi melibatkan estimasi terbesar oleh manajemen dan dapat diduga bahwa manajer dapat berperilaku oportunistik dalam mengestimasi nilai wajar demi kepentingannya sendiri sehingga informasi nilai wajar di *level 3* kurang dapat diandalkan dan merupakan sinyal buruk atau yang dipandang oleh investor sebagai *bad news* yang akan mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan. Penelitian Billiot *et al.* (2017) menemukan bahwa pengukuran aset nilai wajar *level 1* dan *level 2* adalah nilai yang relevan dan berhubungan positif dengan harga saham, namun pengukuran nilai wajar *level 3* berhubungan negatif dengan harga saham karena ini adalah harga yang di estimasi dan mengandalkan input yang tidak dapat diobservasi oleh perusahaan, seringkali pada pasar yang tidak aktif. Sedangkan Song *et al* (2010) menemukan bukti bahwa relevansi nilai dari level 1 dan level 2 nilai wajar lebih besar dibandingkan level 3.

2. Tata kelola perusahaan sebagai pemoderasi relevansi nilai wajar aset di level 3

Dalam beberapa kasus sesuai dengan perspektif *efficiency contracting* bahwa manajer dapat menggunakan informasi pribadi mereka untuk melaporkan nilai wajar



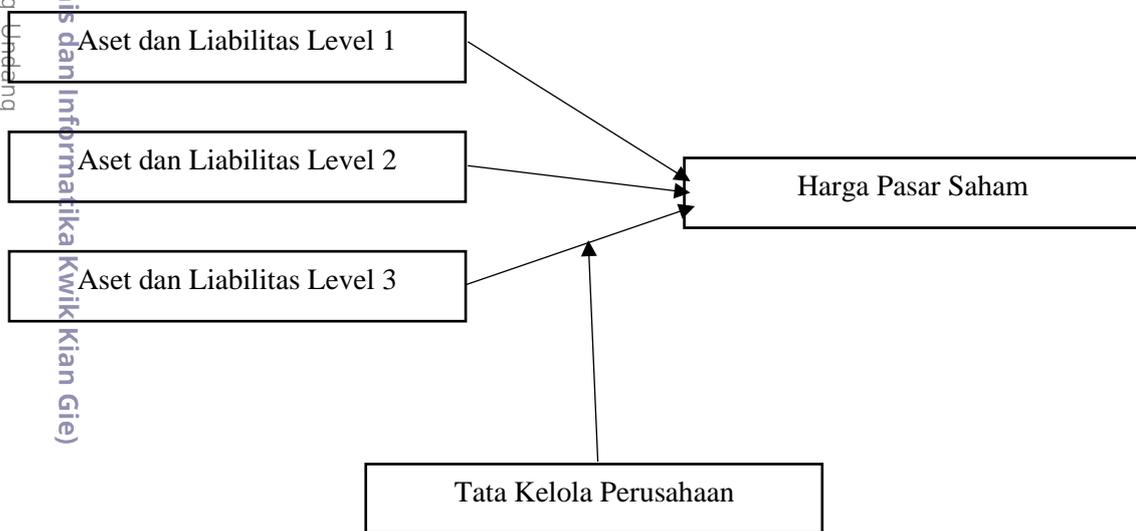
secara kredibel (Barth *et al.*, 1998). Namun, para peneliti terdahulu memberikan bukti yang berlawanan sesuai dengan *opportunistic behavior* bahwa manajer dapat memanipulasi input untuk nilai wajar demi kepentingan mereka sendiri sehingga dapat menyesatkan para pemegang saham (Aboody *et al.*, 1999; Bartov *et al.*, 2007). Hal tersebut jika dilihat melalui perspektif teori keagenan, terjadi karena adanya asimetri informasi antara manajemen dan investor. Untuk perusahaan dengan mekanisme tata kelola perusahaan yang lemah, masalah asimetri informasi yang terkait dengan nilai wajar mungkin lebih besar. Tata kelola perusahaan mungkin harus memainkan peran yang lebih besar dalam relevansi nilai wajar level 3 di mana asimetri informasi kemungkinan besar paling tinggi. Kesalahan pengukuran dikatakan lebih besar untuk input yang tidak dapat diamati level 3 dan mungkin level 2 dibandingkan input yang dapat diamati secara langsung di pasar aktif level 1. Dengan ini, tata kelola perusahaan dianggap lebih efektif dalam mengurangi masalah yang terkait dengan level 3 nilai wajar.

Bhat (2009) memberikan bukti bahwa pelaku pasar menganggap keuntungan dan kerugian nilai wajar bank dengan tata kelola perusahaan yang kuat lebih relevan dan dapat diandalkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan membantu pelaku pasar dalam mengevaluasi kualitas estimasi nilai wajar. Cornett *et al.* (2009) berpendapat bahwa ukuran dewan komisaris dikaitkan secara negatif dengan kualitas akuntansi, karena dewan yang lebih besar kurang efektif dalam peran pemantauan mereka. Sementara, komisaris independen yang didominasi oleh pihak luar, memiliki posisi yang lebih baik untuk memantau dan mengontrol manajer (Cornett *et al.* 2009). Kemudian, DeZoort dan Salterio (2001) menegaskan bahwa komite audit yang memiliki keahlian yang lebih baik dan pengalaman sebelumnya lebih mungkin untuk memberikan pendapat yang lebih akurat terutama pada tugas audit dan pelaporan keuangan. Penman (2007) membahas pentingnya kompetensi dan independensi dewan, serta efektivitas sistem

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

pengendalian internal dalam meminimalkan bias dalam estimasi nilai wajar level 3. Secara keseluruhan, hierarki nilai wajar yang disyaratkan dalam standar akuntansi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kekuatan tata kelola perusahaan tampaknya mengurangi masalah asimetri informasi yang timbul dari input nilai wajar yang relatif kurang andal.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H1: Nilai wajar aset dan liabilitas pada *level 1*, *level 2* dan *level 3* memiliki relevansi nilai dalam pengambilan keputusan.

H2: Relevansi nilai wajar pada *level 1* dan *level 2* lebih tinggi dibandingkan pada *level 3*.

H3: Tata kelola perusahaan dapat memperkuat relevansi nilai wajar aset pada level